BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar melakukan kegiatan pembangunan nasional dan infrastruktur. Manfaat dari kegiatan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah adalah untuk mensejahterakan kehidupan Masyarakat (Stiawan & Sanulika, 2021). Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan paling besar dibanding sektor penerimaan lain. sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi atau maupun badan. Di Indonesia telah banyak perusahaan yang tergolong WP Badan dari berbagai macam sektor industri. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terutang yang harus di bayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak terutang yang besar tersebut. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Saat sekarang ini telah banyak perusahaan bermunculan. Setiap perusahaan selalu melakukan pembaharuan dalam meningkatkan segala aspek dalam perusahaan. Perusahaan merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang diperoleh dari laba bersih perusahaan. Cara perusahaan agar laba tidak berkurang banyak karena beban pajak dengan melakukan agresivitas

pajak, yaitu dilihat dari beberapa agresif manajemen saat menurunkan beban pajak. Kewajiban membayar pajak yang dimiliki oleh badan usaha atau perusahaan sesuai dengan porsi atau aturan berlaku. Semakin besar penghematan pajak yang diambil perusahaan, maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Menurut (Maulana, 2020). Agresivitas pajak adalah suatu kegiatan atau tindakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan baik secara aktif maupun ilegal guna mengecilkan beban pajaknya sehingga laba perusahaan yang didapatkan menjadi optimal. Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 yaitu, *Tax Avoidance (Legal)* dan *Tax Evasion (Illegal)*. *Tax Avoidance* merupakan pelanggaran perpajakan dengan skema penghindaran pajak, untuk meringankan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan di suatu negara. *Tax Avoidance* dianggap sah dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax Evasion* merupakan suatu pelanggaran perpajakan dengan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Motif perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah untuk memperbesar keuntungan yang diperoleh perusahaan seperti yang diharapkan oleh para pemegang saham, serta pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer ini menyebabkan manajer bersikap oportunis demi tujuan keuntungan jangka pendek dengan tidak mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan.

Dalam praktiknya agressivitas pajak dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan serta tindakan secara terang-terangan tidak membayar sejumlah yang seharusnya untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan cukup signifikan. Tindakan ini memperbesar potensi kerugian negara karena kurangnya jumlah pajak yang masuk ke kas negara dari yang seharusnya. Agressivitas pajak banyak dilakukan oleh perusahaan -perusahaan multionasional di indonesia.

Salah satu subjek pajak yang menyumbang penerimaan pajak adalah pajak badan, yaitu perusahaan. Perusahaan menghadapi beban keuangan yang besar dari perpajakan karena berpotensi mengurangi laba bersih mereka. Oleh karena itu, tidak jarang beberapa perusahaan menerapkan taktik penghindaran pajak, yang juga disebut sebagai agresi pajak, dengan membatasi pengeluarannya (Afrika, 2021). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengungkap bukti agresivitas pajak yang dilakukan salah satu sektor yang berpotensi dalam tindakan agressivitas pajak pada kasus PT Bentoel Internasional Investama, PT Bentoel Internasional Investama merupakan produsen perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 Perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pemabayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian U\$14

juta per tahun.

Kasus agresivitas pajak yang dilakukan oleh PT Bentoel adalah dengan membayar royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta setiap tahun. Perusahaan rata-rata membayar setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Seharusnya pajak perusahaan rata-rata atas pembayaran setiap tahun dengan suku bunga 25% sebesar US\$ 2,5 juta untuk royalti, US\$ 1,3 juta untuk ongkos, dan US\$ 1,1 juta untuk biaya IT. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15% sedangkan biaya layanan teknis tidak dikenakan pemotongan. Biaya IT tidak disebutkan dalam perjanjian. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaanperusahaannya di Inggris (Dewata et al., 2021) penjualan yang dilakukan oleh TMMI lebih redah dari harga pokok produksinya dan transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (H. Hidayat & Wijaya, 2019).

Tindakan agresivitas pajak yang kedua terkait pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang awalnya melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas. PT Indofood melakukan pemekaran usaha telah dikenakan keputusan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa harus tetap membayar pajak yang terutang senilai Rp 1,3 miliar. Fenomena agresivitas pajak yang diungkap oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bahwa saat ini tarif pajak penghasilan (PPh) Badan berdasarkan UU No.2 Tahun 2020 akan

terus mengalami turun, dari 25% menjadi 22% dan akan berubah menjadi 20% di tahun depan, dalam hal ini pemerintah ingin melakukan compliance yang adil, namun banyak WP Badan menggunakan skema penghindaran pajak.

Kasus ketiga Tindakan lainnya terkait agresivitas pajak adalah kasus PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing pada tahun 2009 hingga 2017 ke anak perusahaan di Singapura (Coaltrade Service International). Anak perusahaan yang ada di Singapura membeli batu bara dari PT Adaro Energy dengan harga yang rendah dan kemudian menjualnya kembali ke pasar internasional dengan harga yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan beban pajak yang diterima oleh PT. Adaro Energy Tbk menjadi lebih rendah daripada pajak yang seharusnya dibayarkan (Sujannah, 2021).

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan multinasional di Indonesia berdampak pada penerimaan kas Negara. Hal ini juga membuat angka *tax ratio* Indonesia kecil dibanding dengan Negara lainnya. Dilansir dari Trusted Indonesia *Tax News Portal*, Indonesia tercatat sebagai negara dengan *tax ratio* terendah ketiga dari 24 negara se-Asia dan Pasifik yang disurvei dan dicatat oleh Organization For Economic Co- operation and Development (OECD).

Transfer pricing dikenal dalam bidang akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar departemen dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi atau departemen tersebut (Nurhayati, 2020). Menurut (Tiwa et al, 2019), Kebijakan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa, dan harga tak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak tercipta harga yang terlalu

rendah atau terlalu tinggi. Namun pada praktiknya transfer pricing menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik transfer pricing sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan . Menurut (Yenni, 2020) dalam tri Marta Chandraningrum, terdapat tiga metode yang umum digunakan dalam penentuan harga tranfer yaitu penentuan harga tranfer atas dasar biaya (cost based-transfer pricing), penentuan harga tranfer atas dasar harga pasar (market based -transfer pricing), dan negoisisi (negotiated transfer pricing). Menurut (Honoren, 2020) dalam Tri Marta Chandraningrum, harga pasar didapat dari daftar harga yang dipublikasikan untuk barang maupun jasa sejenis dengan produk atau jasa, ditransfer dari harga yang dibebankan dari devisi produksi jika menjual kepada pihak luar. Dalam grup perusahaan multionasional memiliki harga pasar, jika barang atau jasa ditransfer pricing antar perusahaan atau devisi, maka harga pasar adalah bentuk dasar yang adil dari perspektif kinerja.

Peraturan Pajak Nomor. PER-32/ PJ/ 2011, Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut dalam (Ita Salsalina Lingga, 2012) , *Transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (Selling division) dan

biaya divisi pembeli (buying division). Mengenai hal ini masalah yang terjadi perlu mendapat perhatian serta akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti.

Agressivitas pajak yang dilakukan banyak perusahaan multinasional terkait juga dengan faktor kepemilikan asing. Kepemilikan asing dapat diartikan bahwa seberapa banyak saham perusahaan dimiliki oleh pihak asing. Semakin besar saham yang dimiliki pihak asing maka akan semakin besar keikutsertaan investor dalam penentuan kebijakan perusahaan yang mengarah kepada meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Logikanya ketika perusahaan berusaha untuk mendapatkan laba maksimal, disisi lain perusahaan juga meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan agressivitas, karena pajak merupakan beban yang mengurangi pendapatan perusahaan.

Kepemilikan asing dikatakan sebagai investor yang canggih yang memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu. Menurut (Dewata et al., 2021) kepemilikan asing umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor atau mengawasi atau mengawasi perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan asing maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi *agency cost*. Dengan adanya kontrol eksternal yang kuat maka manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, adanya kepemilikan asing kinerja perusahaan seharusnya menjadi lebih baik.

Selain itu adanya *kepemilikan institusional*, merupakan kepemilikan institusi lain dan pemilik blok dengan kepemilikan lebih besar dari 5%. Investor institusional dapat memantau kinerja mereka saat mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan sebuah institusi dengan saham tinggi

memaksa manajemen untuk fokus pada kinerja perusahaan dan membuat semua keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan oleh pemegang saham, Manfaat partisipasi dalam pengambilan keputusan memungkinkan investor ini mempengaruhi kinerja eksekutif dalam pengambilan keputusan dan meminimalkan biaya pajak melalui penghindaran pajak. Tentu saja, ini terkait dengan tujuan agar investor bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dan dividen yang diharapkan. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membayar (Yulianti & Cahyonowati, 2023).

Pada dasarnya investor menginginkan tingkat pengembalian atas modalnya dalam skala maksimal, maka persepsi investor atas penghindaran pajak dapat bervariasi tergantung sudut pandang dan penilaian mereka terhadap penghindaran pajak. Investor akan menilai jika penghindaran pajak dianggap menguntungkan perusahaan. Dalam hal ini berarti investor menilai manfaat atas penghindaran pajak lebih besar dari pada potensi *reputation loss* dan sanksi dari otoritas pajak saat penghindaran pajak berubah menjadi sengketa pajak. Sementara itu, investor dapat menilai negatif penghindaran pajak ketika keuntungan dari penghindaran pajak dinilai lebih rendah dari potensi kerugian.

Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki konsep bahwa pemangku kepentingan terlibat dalam tanggung jawab. CSR bertujuan untuk secara merata meningkatkan hubungan antara lingkungan, norma, dan nilai yang hidup berdampingan dalam masyarakat secara seimbang. Pentingnya pengungkapan CSR diakui oleh banyak perusahaan. Pengungkapan CSR mempengaruhi nilai dan legitimasi suatu perusahaan. CSR dan pajak adalah dua komitmen penting usaha

yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kelangsungan usaha perusahaan. Perusahaan memiliki dua beban: beban pajak dan beban kegiatan CSR adalah pengurangan penghasilan kena pajak untuk penyesuaian pajak CSR, karena CSR diklasifikasikan sebagai kontribusi dan dapat dikurangkan dari total pendapatan. Selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun agar perusahaan tidak memiliki dua beban maka perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,,penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN ASING ,DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP AGRESIVITAS WAJIB PAJAK DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kajian kajian Akuntansi mengenai perpajakan,banyak faktor mempengaruhi penggelapan pajak.Maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional,sehingga menyebabkan perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak yang agresif agar keuntungan perusahaan tidak berkurang banyak.
2. Banyaknya perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak

menyebabkan kerugian bagi negara ,karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.

3. Transfer Pricing merupakan penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
4. Transfer pricing mampu menyebabkan peluang pendapatan pajak suatu negara akan berkurang disebabkan perusahaan memindahkan beban pajaknya dengan metode menurunkan harga jual kepada perusahaan .
5. Adanya pengaruh dari kepemilikan asing yang digunakan untuk tindakan agressivitas pajak.
6. Adanya kepemilikan asing dalam perusahaan yang terdaftar di BEI berarti menunjukkan bahwa indonesia telah mengalami peningkatan jumlah saham asing.
7. Kepemilikan Institusional yang digunakan untuk menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya.
8. Manfaat atas agressivitas pajak pajak lebih besar dari pada potensi *reputation loss* dan sanksi dari otoritas pajak.
9. Perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR sehingga melakukan tindakan agressivitas pajak.

10. Berkurangnya potensi penerimaan pajak di suatu negara karena perusahaan multinasional yang melakukan tindakan agressivitas pajak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka masalah dibatasi tentang pengaruh *Transfers Pricing* (X1), Kepemilikan Asing (X2) dan Kepemilikan Institusional (X3) sebagai variabel bebas, kemudian *Agressivitas pajak* (Y) sebagai variabel terikat dan Corporate Social Responsibility (Z) sebagai variabel Moderasi di Perusahaan Multinasional Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transfer pricing terhadap Agressivitas Pajak di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap Agressivitas Pajak di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap Agressivitas Pajak di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh transfer pricing terhadap Agressivitas

Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai variabel moderasi di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023?

5. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap Agresivitas pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai variabel moderasi dengan di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap Agresivitas pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai variabel moderasi di Perusahaan sektor makanan dan minuman Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh transfer pricing terhadap Agresivitas Pajak di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman Yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
2. Untuk mengetahui Pengaruh kepemilikan asing terhadap Agresivitas Pajak di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman Yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
3. Untuk mengetahui Pengaruh kepemilikan institusional terhadap Agresivitas Pajak di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan

- minuman Yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Transfer Pricing terhadap Agressivitas pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai variabel moderasi di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman Yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
 5. Pengaruh kepemilikan asing terhadap Agressivitas Pajak dengan corporate social responsibility variabel moderasi di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman Yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
 6. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap Agressivitas Pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi di Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman Yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari penelitian antara lain adalah:

1. Bagi Perusahaan

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi Agressivitas wajib pajak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat member mamfaat kepada peneliti dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan, sebagai acuan, sebagai bahan menganalisa, sebagai bahan referensi dan juga dapat mengembangkan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama dan untuk akademik yaitu terutama lembaga pendidikan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau replikasi bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.